

ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PEMBENTUKAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO (Studi Empiris pada Perusahaan Finansial Non Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011)

Gea Fatah Sambera, Wahyu Meiranto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the impact of board of commissioner characteristics and firm characteristics to the establishment of Risk Management Committee (RMC) in financial non bank firms. Establishment of Risk Management Committee in question is the existence of RMC in the company, whether affiliated with audit committee or separated from the audit committee and independent. Board of commissioner characteristics used in this research are proportion of independent commissioner, board size, and frequency of meetings. While the firm characteristics used in this research are financial reporting risk, leverage and business complexity, and firm size as control variable.

Sample of this research were financial non bank firms listed in Indonesia Stock Exchange for the observation period from 2009 until 2011. Collecting data in this research used a purposive sampling method and resulted 57 samples. This research used logistic regression to analyze data.

Result of this research showed that financial reporting risk affected positively and significant to the establishment both of affiliated RMC and Separated RMC and business complexity affected positively and significant to the establishment of affiliated RMC. While firm size as control variable had positive and significant impact to the establishment of affiliated RMC and Separated RMC.

Keywords: corporate governance, risk management committee, board of commissioner characteristics, firm characteristics

PENDAHULUAN

Sebagai akibat dari kejadian runtuhnya beberapa perusahaan di AS yang terjadi karena penipuan maupun kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan kepada investor dan kreditor dalam pelaporan akuntansi seperti pada kasus perusahaan Enron dan Worldcom beberapa tahun yang lalu, membuat perusahaan-perusahaan yang ada mencoba berinisiatif untuk meningkatkan *corporate governance* dengan cara meningkatkan perhatiannya pada pengelolaan manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Sampai saat ini, selain berfokus pada risiko yang mengancam profitabilitasnya, perusahaan juga harus mempertimbangkan berbagai risiko lain yang mengancam pembentukan perusahaan. Lingkungan perusahaan yang berkembang pasti juga mengakibatkan risiko bisnis perusahaan yang semakin kompleks yang harus dihadapi oleh perusahaan.

Risiko adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi sasaran organisasi. Salah satu atribut risiko adalah ketidakpastian, baik dari sesuatu yang sudah diketahui maupun dari sesuatu yang belum diketahui (KNKG, 2011). Risiko yang dihadapi oleh perusahaan tidak hanya risiko finansial dari pelaporan akuntansi, akan tetapi bisa juga muncul risiko bisnis dan risiko operasional yang menambah kompleksitas perusahaan. Oleh karena itu, saat ini sangatlah diperlukan suatu pengelolaan risiko atau yang biasa disebut dengan manajemen risiko (*risk management*). Sistem manajemen risiko yang efektif dapat dipandang sebagai suatu keunggulan yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan

¹ Corresponding author

sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Sistem manajemen risiko yang efektif juga berperan dalam menciptakan nilai bagi para *stakeholder* (COSO, 2004). Lebih jauh lagi, manajemen risiko tidak seharusnya dipandang sebagai penghindaran risiko atau pengeliminasian risiko. Akan tetapi, manajemen risiko seharusnya dipandang sebagai suatu proses dalam menjamin apakah suatu perusahaan mengambil risiko secara bertanggung jawab dengan menyeimbangkan biaya dan keuntungan yang berhubungan dengan risiko yang ada (Krus dan Orowitz, 2009).

Tiap perusahaan memiliki tipe dan karakteristik tersendiri dalam penerapan manajemen risikonya. Beberapa perusahaan masih mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada Komite Auditnya (Bates dan Leclerc, 2009; Krus dan Orowitz, 2009; COSO, 2009). Tugas dan tanggung jawab utama Komite Audit itu sendiri adalah untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* terutama yang berkaitan dengan *disclosure* dan *transparancy* serta melaporkan risiko-risiko yang terkait dengan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan melaporkan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Corporate Governance (KNKG) pada tahun 2002, menyatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah mengenai manajemen risiko dan kontrol perusahaan, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut. Banyak wacana dan literatur yang menyatakan bahwa luasnya keterlibatan Komite Audit tidak menjamin efektivitas kerjanya, dan hal ini dianggap berasal dari bermacam-macam tugas yang harus dipertimbangkan oleh Komite Audit. Padahal tugas pengawasan manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai struktur dan operasi perusahaan secara keseluruhan beserta risiko-risiko yang terkait, seperti risiko produk, risiko teknologi, risiko kredit, risiko peraturan, dan risiko yang lain (Bates dan Leclerc, 2009).

Dengan adanya berbagai pertimbangan dan semakin kompleksnya mekanisme suatu pengawasan dan manajemen risiko yang dilakukan oleh Komite Audit, maka banyak perusahaan berusaha membuat suatu sistem baru dan membentuk suatu komite pengawasan risiko yang terpisah dari Komite Audit yaitu bernama Komite Manajemen Risiko, atau disebut dengan *Risk Management Committee* (RMC). Pemisahan fungsi ini dari Komite Audit bertujuan agar fungsi pengawasan dan manajemen risiko berjalan lebih efektif.

Risk Management Committee dapat didefinisikan sebagai sebuah *sub committee* dari komite pengawas manajemen yang terpisah dari Komite Audit dan berdiri sendiri, yang menyediakan pembelajaran secara khusus mengenai manajemen risiko perusahaan pada level Dewan Komisaris, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level Dewan Komisaris, dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan (KPMG, 2001 dalam Subramaniam, *et al.* 2009). Dengan berbagai tugas yang harus dilakukan oleh RMC tersebut, maka RMC dapat dikatakan sebagai sumber daya penting bagi Dewan Komisaris dalam hal tanggung jawabnya pada penerapan dan pengawasan manajemen risiko perusahaan. Anggota RMC yang terspesialisasi pada bidang manajemen risiko juga dinilai dapat menguntungkan perusahaan dengan memberikan pemahaman yang lebih kuat akan profil risiko perusahaan kepada Dewan Komisaris (Bates dan Leclerc, 2009).

Hingga beberapa tahun ini, pembentukan RMC telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. *Survey* yang dilakukan oleh KPMG pada tahun 2005 terhadap 200 perusahaan Australia teratas yang terdaftar di *Australian Stock Exchange* (ASX), menyatakan bahwa lebih dari setengah responden yang digunakan (54%) telah memiliki RMC. Dan dari jumlah tersebut, sebesar 70% tergabung dengan Komite Audit (KPMG, 2005). *Survey corporate governance* pada perusahaan publik oleh *National Association of Corporate Directors* (NACD) pada tahun 2008. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebesar 66,7% perusahaan menyerahkan tugas pengawasan risikonya secara langsung kepada Komite Audit, 23,5% perusahaan melakukan pengawasannya sendiri oleh dewan (*full board*), dan sisanya menyerahkan tugas pengawasan risikonya kepada RMC. *Survey* ini juga membuktikan bahwa sebesar 79% responden dengan RMC yang terpisah dari Komite Audit mengaku dapat lebih efektif mengelola risiko dibanding dengan responden yang mendelegasikan tugas pengawasan risiko pada Komite Audit (Bates dan Leclerc, 2009).

Di Indonesia, pembentukan RMC juga mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan adanya suatu kebijakan pemerintah yang mulai memandatkan pembentukan RMC sebagai komite pengawas risiko pada industri finansial perbankan. Akan tetapi,

berbeda dengan industri perbankan yang merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) dan diregulasi secara ketat, pembentukan komite pengawas risiko pada industri finansial non perbankan masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum ada regulasi yang secara khusus mengaturnya. Dengan demikian, semakin besar perhatian perusahaan pada sistem manajemen risikonya, maka diharapkan perusahaan dapat mendirikan suatu sistem maupun komite yang dapat menunjang sistmen manajemen risiko tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan tentang hubungan agensi sebagai sebuah kontrak dimana salah satu pihak (*principal*) menggunakan pihak lain (*agent*) untuk mengerjakan suatu layanan tertentu demi kepentingan mereka, dengan melibatkan suatu pendelegasian wewenang pengambilan keputusan oleh *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Teori ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan antar yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) untuk bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain. Masing-masing pihak disini mempunyai kepentingan mereka sendiri-sendiri, dan perbedaan kepentingan ini bisa saja menyebabkan timbulnya *information asymetri* (kesenjangan informasi) antara pemegang saham (*stakeholder*) dan organisasi.

Atas dasar perbedaan kepentingan ini jugalah masing-masing pihak berusaha untuk memperbesar keuntungan bagi diri mereka sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan, sedangkan agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Subramaniam *et al.* (2009) juga menjelaskan jika Teori Keagenan ini lebih memfokuskan pada motif atas perilaku manusia (yang dimaksud disini adalah prinsipal-agen), secara khusus mengenai *self interest* dan mengesampingkan alasan lain yang mungkin mempengaruhi keputusan perusahaan.

Konsep Risiko dan Manajemen Risiko

Risiko merupakan sesuatu yang selalu ada dan pasti dihadapi dalam kehidupan manusia. Risiko merupakan suatu cerminan dari ketidakpastian dari apa yang akan terjadi di masa depan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga bagaimanapun juga harus diambil langkah inisiatif untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Risiko juga diyakini dapat menyebabkan kehancuran dari suatu organisasi, sehingga risiko itu penting untuk dikelola dan diperhatikan. Risiko juga pasti tidak dapat dihindari, oleh karena itu pemahaman atas risiko ini merupakan suatu langkah untuk menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dalam dunia usaha atau organisasi, risiko merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh organisasi, terutama organisasi yang mempunyai kegiatan yang kompleks yang memerlukan perhatian atas risiko-risiko yang ada, seperti risiko bisnis dan risiko finansial. Risiko bisnis merupakan risiko yang mana perusahaan berasumsi untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif dan menambah suatu nilai bagi para pemegang sahamnya. Sedangkan risiko finansial dapat didefinisikan sebagai berbagai risiko yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan kerugian dalam pasar finansial, seperti kerugian yang diakibatkan karena pergerakan tingkat bunga atau kegagalan berinvestasi dalam obligasi finansial (Jorion, 2002).

Manajemen risiko adalah salah satu disiplin yang menjadi populer menjelang akhir abad ke-20. Disiplin ini mengajak kita untuk secara logis, konsisten dan sistematis melakukan pendekatan terhadap ketidakpastian masa depan, sehingga memungkinkan kita untuk secara lebih hati-hati (*prudent*) dan produktif menghindari hal-hal yang tidak berguna karena membuang sumber daya secara tidak perlu dan mencegah hal-hal yang merugikan atau bahkan meraup dan mengejar hal-hal yang bermanfaat (KNKG, 2011). Manajemen risiko juga merupakan bagian integral dari suatu praktek bisnis yang baik. Manajemen risiko membawa dasar informal oleh banyak organisasi. Secara umum/tradisional manajemen risiko telah berkembang sebagai disiplin ilmu yang profesional dan teknis di sejumlah bidang seperti keuangan, kesehatan dan keamanan. Meskipun organisasi menghadapi berbagai risiko termasuk risiko keuangan, operasional, reputasi, peraturan dan informasi (Burlando, 1990; KPMG, 2001).

Komite Manajemen Risiko

Dalam Laporan Tahunan PT Bakrie & Brothers Tbk. tahun 2008, dijelaskan bahwa Komite Manajemen Risiko adalah komite yang bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kebijakan manajemen risiko yang diterapkan direksi serta memastikan bahwa semua risiko telah diantisipasi dan aset-aset berisiko telah diasuransikan dengan semestinya. Pendirian dan pengungkapan dari RMC menunjukkan bahwa komite dewan berusaha untuk berkomitmen dalam mencapai kualitas yang tinggi dalam *corporate governance*. Dengan kata lain, perusahaan yang mendirikan RMC dapat mempunyai kekuatan lebih dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai RMC di dalamnya.

Dalam pembentukannya, RMC dapat tergabung dengan Komite Audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. RMC mempunyai tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu mereka dalam seluruh aspek pengawasan manajemen risiko perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Suatu perusahaan yang mempunyai RMC yang berdiri sendiri dan terpisah dari Komite Audit akan membuat anggota komite lebih fokus secara penuh pada berbagai proses dan pelaporan risiko, serta dapat menyediakan kualitas yang lebih baik dalam pengawasan internal daripada suatu perusahaan yang mempunyai RMC yang digabung dengan Komite Audit. Lebih jauh lagi, pengungkapan yang disediakan oleh RMC yang terpisah dari Komite Audit akan lebih kuat merefleksikan *good corporate governance* dan kualitas pengawasan risiko internal yang lebih baik dibandingkan dengan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.

Dengan kata lain, RMC yang tergabung dengan Komite Audit tidak hanya harus melakukan suatu pengawasan terhadap manajemen risiko tetapi juga harus ikut terlibat secara aktif dengan pelaporan laporan keuangan dan mungkin juga dapat menimbulkan suatu kesalahan karena mempunyai pekerjaan ganda tersebut. Inilah yang menjadi keunggulan efektifitas dan efisiensi dari RMC yang terpisah dari Komite Audit.

Karakteristik Dewan Komisaris

Karakteristik Dewan Komisaris dibagi menjadi tiga yaitu Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris dan Frekuensi rapat Dewan Komisaris. Peraturan mengenai Komisaris Independen di Indonesia sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006. Komisaris Independen ini dapat disebut sebagai komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa pembentukan Komisaris Independen menjadi salah satu hal yang diwajibkan bagi perusahaan publik yang terdaftar di bursa. Dalam peraturan tersebut, perusahaan publik wajib memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Presentase ini dianggap dapat mewakili stakeholder yang dianggap minoritas, sehingga kemungkinan terjadinya perbedaan perlakuan antara stakeholder mayoritas dan minoritas tidak akan terjadi.

Dalam *Code of Good Corporate Governance*, ukuran dan jumlah anggota Dewan Komisaris telah diatur sedemikian rupa. Jumlah anggota dewan atau ukuran dewan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Karena tentunya antar perusahaan yang satu dengan yang lain pasti mempunyai kepentingan, ukuran dan kompleksitas mereka masing-masing.

Jumlah anggota yang harus dimiliki Dewan Komisaris sebaiknya lebih besar atau paling tidak sama dengan jumlah anggota Dewan Direksi. Hal ini dikarenakan apabila jumlah anggota Dewan Komisaris lebih sedikit dibandingkan Dewan Direksi, maka akan terdapat kemungkinan anggota Dewan Komisaris mendapat tekanan psikologis jika ada perbedaan pendapat antara kedua pihak tersebut (Indrayati, 2010).

Rapat Dewan Komisaris merupakan suatu proses yang dilalui oleh Dewan Komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Dewan Direksi dan implementasinya. Yatim (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Dewan Komisaris yang mengadakan rapat secara teratur dapat mengurangi insiden dalam masalah

pelaporan keuangan. Dengan mengadakan rapat secara teratur, dengan auditor eksternal dan manajemen, maka Dewan Komisaris dapat memperluas informasi dan pengetahuan tentang akuntansi dan permasalahan dalam manajemen risiko.

Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan terbagi menjadi 3 yaitu Risiko Pelaporan Keuangan, *Leverage* dan Kompleksitas Perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai proporsi piutang dan persediaan lebih besar pada asetnya dilihat mempunyai risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi, karena adanya tingkat ketidakpastian dalam data akuntansi (Korosec dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009). Subramaniam, *et al.* (2009) juga menambahkan suatu perusahaan yang mempunyai proporsi piutang yang lebih besar, maka risiko yang lebih tinggi atas piutang tak tertagih yang diragukan tersebut akan diakui secara tidak tepat. Karena dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan finansial non perbankan dimana tidak ada rekening persediaan dalam laporan keuangan maka akun persediaan ini diganti menjadi rekening kredit.

Leverage merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini dapat digunakan juga untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajibannya jika perusahaan dilikuidasi. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan perusahaan, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan dan sebaliknya apabila rasio *leverage* rendah maka risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin rendah.

Kompleksitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah semua segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai segmen bisnis yang lebih besar biasanya mempunyai lini produksi, departemen atau strategi pemasaran yang lebih banyak. Sebagai hasilnya, kompleksitas perusahaan yang lebih besar dapat meningkatkan risiko dalam level-level yang berbeda termasuk risiko operasional dan risiko teknologi, yang menuntun terhadap permintaan yang lebih besar dalam pengawasan risiko-risiko tersebut (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Pengaruh Komisaris Independen terhadap pembentukan RMC

Independensi merupakan hal yang penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Proporsi Komisaris Independen di dalam suatu dewan merupakan sebuah indikator independensi dari dewan. Sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim, 2009).

Perusahaan dengan proporsi Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih memperhatikan risiko yang akan dihadapi perusahaan, dan dengan membentuk RMC mungkin dapat membantu mereka dalam menghadapi tanggung jawab pengawasan manajemen risiko dibandingkan dengan proporsi Komisaris Independen yang rendah. Selain itu, sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang lebih besar akan lebih menyukai pembentukan RMC yang berdiri sendiri atau terpisah dari Komite Audit karena pembentukan RMC ini akan bisa lebih berfokus pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut :

H1 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H1(a) : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC

Pembentukan RMC mungkin juga berhubungan dengan ukuran dewan. Ukuran dewan yang besar cenderung dapat menjadi sumber daya yang besar bagi Dewan Komisaris (Subramaniam, *et al.*, 2009). Ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kekuatan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Subramaniam, *et al.* (2009), bahwa komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Komite Remunerasi dapat dipastikan akan selalu ada pada situasi dimana *agency cost* tinggi, seperti

leverage yang tinggi serta kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar. Sehingga ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris yang ditujukan untuk manajemen risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi Dewan Komisaris membentuk RMC, dan tingkat sumber daya yang ditawarkan oleh ukuran dewan yang besar akan membuat Dewan Komisaris lebih menyukai dibentuknya RMC yang berdiri sendiri atau tidak tergabung dengan Komite Audit. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H2(a) : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

Pengaruh Frekuensi Rapat terhadap Pembentukan RMC

Cotter *et al.* (1998) dalam Juwitasari (2008) mengatakan bahwa frekuensi *meeting* Dewan Komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari Dewan Komisaris. Fokus dan perhatian penelitian ini pada *meeting* dewan adalah tepat mengingat frekuensi *meeting* dewan secara potensial akan meningkatkan komunikasi antara direksi dan fungsi *internal control* (seperti RMC) dan menjadikan dewan lebih efektif dalam tugas pengawasannya. Frekuensi dari *meeting* dewan menjadikan sebuah dewan lebih aktif (Raghuandan and Rama dalam Yatim (2009).

Intensitas aktivitas dewan, seperti frekuensi *meeting* ini dapat memberikan kontribusi dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen terhadap berbagai kepentingannya, yang mungkin saja ada suatu tindakan yang dapat merugikan bagi perusahaan maupun *principal*. Pertemuan dewan yang diadakan lebih sering akan memperlihatkan bahwa anggota dewan tersebut terlihat lebih rajin dan hal itu akan menguntungkan bagi *shareholders*. *Meeting* dewan juga merupakan suatu sumber daya dalam meningkatkan keefektifan dari dewan. Oleh karena itu, semakin sering anggota dewan menyelenggarakan rapat, maka akan dapat mendukung terbentuknya suatu komite baru yaitu RMC. Sehingga dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H3 : Frekuensi rapat berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H3(a) : Frekuensi rapat berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

Pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan terhadap Pembentukan RMC

Perusahaan dengan proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan cenderung untuk memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi (Koroses dan Horvat, 2005 dalam Subramaniam *et al.*, 2009). Pembentukan RMC dan terutama SRMC, akan memfasilitasi pengawasan yang lebih baik dari risiko-risiko tersebut.

Risiko pelaporan keuangan ini sangat berhubungan dengan *agency conflict* yang berpotensi dapat terjadi, yaitu *earning retention*. *Earning retention* adalah keadaan dimana manajemen cenderung mempertahankan tingkat perusahaan yang stabil, yang bertujuan agar kinerja manajemen terlihat bagus. Hal ini sangat berkaitan dengan tingkat piutang usaha dan persediaan yang tinggi, sehingga di tingkat piutang usaha dan persediaan yang tinggi perusahaan cenderung akan membentuk RMC sebagai bentuk *monitoring* terhadap kinerja manajemen. Sehingga dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H4 : Risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H4(a) : Risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

Pengaruh Leverage terhadap Pembentukan RMC

Leverage adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan membuat keadaan keuangan perusahaan menjadi memburuk, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dengan adanya

risiko tersebut tentu pembentukan RMC akan menjadi mekanisme yang penting dalam mengawasi risiko tersebut, dan lebih jauh, RMC yang berdiri sendiri akan menjadikan fungsi pengawasan risiko lebih efektif.

Hal ini sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja manajemen, karena suatu tingkat *leverage* yang tinggi akan berdampak negatif terhadap para pemegang saham selaku *principal*. Apalagi jika perusahaan tersebut mengalami likuidasi yang mengharuskan membayar semua hutang perusahaan terlebih dahulu dibandingkan mengembalikan seluruh aset yang telah ditanamkan oleh *principal*. Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H5 : Leverage berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H5(a) : Leverage berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC

Pengaruh Kompleksitas terhadap Pembentukan RMC

Kompleksitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Kompleksitas yang lebih besar meningkatkan risiko pada tingkat level yang berbeda termasuk risiko operasional dan teknologi yang menuntun terhadap permintaan yang lebih besar untuk mengawasi risiko tersebut (Subramaniam *et al.*, 2009). Semakin besar segmen bisnis yang dimiliki perusahaan maka akan membutuhkan mekanisme manajemen risiko yang efektif. Hal ini akan menyebabkan pembentukan RMC menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan.

Penelitian Yatim (2009) membuktikan bahwa kompleksitas dari operasi perusahaan membutuhkan pengawasan yang lebih besar dari RMC yang secara utama berfokus untuk mengidentifikasi risiko bisnis dan menemukan cara untuk mengurangi risiko tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut :

H6 : Kompleksitas berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

H6(a) : Kompleksitas berpengaruh positif terhadap pembentukan SRMC.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah pembentukan RMC. Pembentukan ini terdiri dari pembentukan RMC dan SRMC dalam suatu perusahaan. Pengukuran ini menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang membentuk RMC (baik yang tergabung maupun terpisah dari Komite Audit) diberi angka satu (1), sedangkan diberi angka nol (0) jika perusahaan tidak membentuk RMC. Sedangkan untuk pembentukan SRMC, juga diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana perusahaan yang mengungkapkan RMC yang terpisah dari Komite Audit diberi angka satu (1), dan diberi angka nol (0) apabila tergabung dengan Komite Audit dalam laporan tahunannya (Subramaniam, *et al.*, 2009)

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Risiko Pelaporan Keuangan, *Leverage*, dan Kompleksitas Perusahaan. Proporsi Komisaris Independen diukur dengan membagi jumlah anggota Komisaris Independen dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menjumlah total anggota Dewan Komisaris. Frekuensi Rapat diukur dengan menjumlah jumlah *meeting* Dewan Komisaris selama satu tahun. Risiko Pelaporan Keuangan diukur dengan menjumlah piutang dan kredit lalu dibagi dengan total aset. *Leverage* diukur dengan membagi total hutang dengan total *asset*. Kompleksitas perusahaan diukur dengan menjumlah segmen bisnis/usaha yang dimiliki oleh perusahaan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan finansial non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2009-2011. Sampel dipilih dari populasi perusahaan yang sahamnya terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2009-2011. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2011.
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan pada periode 2009-2011.

3. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari tahun 2009 hingga 2011, salah satunya tentang pengungkapan frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan finansial non perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI <http://www.idx.co.id> dan pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan studi observasi. Metode studi pustaka yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam lingkup penelitian ini. Sedangkan metode studi observasi, yaitu dengan cara memperoleh data dengan menggunakan dokumentasi yang berdasarkan pada laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI di situsnya dan pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Data yang digunakan merupakan data *time series*.

Metode Analisis

Pada penelitian ini pengujian model dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{logit(RMC)} = \alpha + \beta_1 (\text{NONEXECDIR}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \beta_3 (\text{BOARDMEET}) + \beta_4 (\text{FINREP}) + \beta_5 (\text{LEV}) + \beta_6 (\text{BUSSEGMENT}) + \beta_7 (\text{SIZE}) + e$$

$$\text{logit(SRMC)} = \alpha + \beta_1 (\text{NONEXECDIR}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \beta_3 (\text{BOARDMEET}) + \beta_4 (\text{FINREP}) + \beta_5 (\text{LEV}) + \beta_6 (\text{BUSSEGMENT}) + \beta_7 (\text{SIZE}) + e$$

Keterangan :

RMC	=	Variabel <i>dummy</i> pembentukan RMC, dimana perusahaan yang memiliki RMC bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.
SRMC	=	Variabel <i>dummy</i> pembentukan RMC yang terpisah dari Komite Audit, dimana perusahaan yang memiliki RMC terpisah dari Komite Audit bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.
α	=	Konstanta
NONEXECDIR	=	Proporsi Komisaris Independen
BOARDSIZE	=	Ukuran Dewan Komisaris
BOARDMEET	=	Frekuensi rapat Dewan Komisaris
FINREP	=	Risiko pelaporan keuangan diukur dari jumlah piutang dan persediaan dibagi total aset
BUSSEGMENT	=	Kompleksitas perusahaan
LEVERAGE	=	Kewajiban jangka panjang dibagi dengan aset
SIZE	=	Ukuran perusahaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan finansial non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian dipilih menggunakan metode *Purposive Sampling*. Berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh 19 perusahaan yang diambil sebagai sampel dari penelitian ini selama 3 tahun, sehingga terdapat total 57 data observasi.

Tabel 1
Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan finansial non perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011	117
2.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan dari tahun 2009-2011	(12)
3.	Perusahaan dengan data yang tidak lengkap terkait variabel penelitian	(48)
Sampel akhir yang diobservasi		57

Sumber : data yang diperoleh dari *IDX*

Deskripsi Variabel

Variabel Proporsi Komisaris Independen (NONEXEDIR) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,44444 atau 44%. Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel telah memiliki lebih dari 30% Komisaris Independen yang diwajibkan dalam suatu Dewan Komisaris. Nilai terendah adalah 0,25 dan nilai tertinggi adalah 0,75 dengan standar deviasi sebesar 0,1283029.

Variabel Ukuran Dewan Komisaris (BOARDSIZE) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,53. Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang. Nilai terendah ukuran Dewan Komisaris adalah 2 dan nilai tertingginya adalah 6 dengan standar deviasi sebesar 1,255.

Variabel Rapat Dewan Komisaris (BOARDMEET) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 7,74. Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel melakukan rapat sebanyak 7 kali dalam satu tahun. Nilai terendah rapat Dewan Komisaris adalah 1 dan nilai tertingginya adalah 13 dengan standar deviasi sebesar 3,672.

Variabel Risiko Pelaporan Keuangan (FINREP) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4387495 atau 43,87%. Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel mempunyai perbandingan piutang dan kredit dengan total *asset* sebesar 43,87%. Nilai terendah dari rasio ini adalah 0,00003 dan nilai tertingginya adalah 0,97691 dengan standar deviasi sebesar 0,32706388.

Variabel *Leverage* (LEV) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4983520 atau 49,83%. Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel mempunyai rasio *leverage* sebesar 49,83%. Nilai terendah dari rasio ini adalah 0,00639 dan nilai tertingginya adalah 0,88822 dengan standar deviasi sebesar 0,21109973.

Variabel Kompleksitas Perusahaan (BUSSESEGMENT) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,26. Ini berarti rata-rata perusahaan sampel mempunyai segmen operasi bisnis sebanyak 3 usaha. Nilai terendah dari variabel ini adalah 1 dan nilai tertingginya adalah 6 dengan standar deviasi sebesar 1,421.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NONEXECDIR	57	0,2500	0,7500	0,444444	0,1283029
BOARDSIZE	57	2	6	3,53	1,255
BOARDMEET	57	1	13	7,74	3,672
FINREP	57	0,00003	0,97691	0,4387495	0,32706388
LEV	57	0,00639	0,88822	0,4983520	0,21109973
BUSSESEGMENT	57	1	6	3,26	1,421
Ln_SIZE	57	24,41	30,08	27,0988	1,30133
Valid N (listwise)	57				

Sumber : Data sekunder yang diolah

Pembahasan Hasil Penelitian

Model regresi logistik dalam penelitian ini dinyatakan lolos dari semua uji analisis data, yaitu Uji Multikolinieritas, Uji Kelayakan Model Regresi dan Uji Kelayakan Keseluruhan Model. Hasil penelitian menunjukkan nilai *Nagelkerke R²* sebesar 0,478 untuk model regresi RMC (I). Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen RMC yang dapat dijelaskan oleh

variabel independen adalah sebesar 47,8%, sedangkan sisanya sebesar 52,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Sedangkan nilai *Nagelkerke R²* untuk model regresi SRMC adalah sebesar 0,575. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen SRMC (Ia) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 57,5%, dan sisanya sebesar 42,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Berikut tabel dari hasil pengujian hipotesis:

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Logistik Model I

Model	B	Sig.	Keterangan
NONEXECDIR	4,300	0,208	Tidak signifikan
BOARDSIZE	-1,272	0,021*	Signifikan
BOARDMEET	0,029	0,795	Tidak signifikan
FINREP	4,644	0,004*	Signifikan
LEV	-2,242	0,263	Tidak signifikan
BUSSELEMENT	0,839	0,041*	Signifikan
Ln_SIZE	1,430	0,002	Tidak signifikan
Constant	-41,529	0,002	

Sumber : Data sekunder yang diolah

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Logistik Model Ia

Model	B	Sig.	Keterangan
NONEXECDIR	1,894	0,638	Tidak signifikan
BOARDSIZE	-1,342	0,041*	Signifikan
BOARDMEET	-0,103	0,440	Tidak signifikan
FINREP	6,254	0,002*	Signifikan
LEV	-0,614	0,789	Tidak signifikan
BUSSELEMENT	-0,002	0,998	Tidak signifikan
Ln_SIZE	1,210	0,035	Tidak signifikan
Constant	-33,024	0,035	

Sumber : Data sekunder yang diolah

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap pembentukan RMC menunjukkan koefisien positif sebesar 4,3 dengan tingkat signifikansi 0,208. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan RMC tidak dipengaruhi oleh proporsi Komisaris Independen, dengan demikian hipotesis 1 ditolak. Dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap pembentukan SRMC menunjukkan koefisien positif sebesar 1,894 dengan tingkat signifikansi 0,638. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan SRMC tidak dipengaruhi oleh proporsi Komisaris Independen, dengan demikian hipotesis 1a ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam, *et al.* (2009) di 200 perusahaan yang terdaftar di *Australian Stock Exchange*, penelitian tersebut menemukan bahwa proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pembentukan RMC. Tidak adanya pengaruh ini mungkin dapat disebabkan oleh level keanggotaan Komisaris Independen dan konsep dari independensi itu sendiri, walaupun Komisaris Independen mungkin mempunyai level independensi yang tinggi, bisa saja hal itu tidak menjadikan Komisaris Independen menjadi independen. Dalam hal ini bisa saja dikarenakan Komisaris Independen tidak diikutsertakan dalam pembuatan keputusan sehari-hari, keindependensian mereka tidak jelas secara penuh dalam hal keuangan organisasi (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pembentukan RMC menunjukkan koefisien negatif sebesar 1,272 dengan tingkat signifikansi 0,021. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan RMC tidak dipengaruhi secara positif oleh ukuran Dewan Komisaris, dengan demikian hipotesis 2 ditolak. Dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pembentukan SRMC menunjukkan koefisien negatif sebesar 1,342 dengan tingkat signifikansi 0,041. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik

pembentukan SRMC tidak dipengaruhi secara positif oleh ukuran Dewan Komisaris, dengan demikian hipotesis 2a ditolak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan maka tidak menjamin akan terbentuknya RMC maupun SRMC secara sukarela. Hal ini bisa saja dikarenakan dengan makin besarnya ukuran dewan, maka tugas dan pengawasan serta *risk monitoring* telah dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris itu sendiri, sehingga tekanan untuk membentuk RMC dan SRMC semakin kecil (Andarini, 2010). Jensen dan Meckling (1976) dalam Andarini (2009) menjelaskan bahwa dengan adanya jumlah komisaris yang semakin besar maka akan membutuhkan biaya *monitoring* yang besar pula. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan antisipasi untuk mengurangi biaya *monitoring*, salah satunya yaitu ukuran dewan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Hal inilah yang mengakibatkan tuntutan untuk membentuk komite baru, khususnya RMC dan SRMC makin kecil.

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Rapat Dewan Komisaris terhadap pembentukan RMC menunjukkan koefisien positif sebesar 0,029 dengan tingkat signifikansi 0,795. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan RMC tidak dipengaruhi oleh rapat Dewan Komisaris, dengan demikian hipotesis 3 ditolak. Dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh Rapat Dewan Komisaris terhadap pembentukan SRMC menunjukkan koefisien negatif sebesar 0,103 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,440. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan SRMC tidak dipengaruhi oleh rapat Dewan Komisaris, dengan demikian hipotesis 3a ditolak.

Hasil statistik di atas menunjukkan bahwa hal ini bisa saja disebabkan karena pertemuan yang diadakan oleh Dewan Komisaris tidak banyak membahas pengawasan perusahaan melalui pembentukan RMC maupun SRMC. Dewan Komisaris bisa saja cenderung untuk mengevaluasi kinerja keuangan dari Dewan Direksi dan merencanakan tindakan-tindakan pengawasan menurut mereka tanpa membentuk komite baru di bawahnya.

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan terhadap pembentukan RMC menunjukkan koefisien positif sebesar 4,644 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan RMC dipengaruhi secara positif oleh risiko pelaporan keuangan, dengan demikian hipotesis 4 diterima. Dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh Risiko Pelaporan Keuangan terhadap pembentukan SRMC menunjukkan koefisien positif sebesar 6,254 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan SRMC dipengaruhi secara positif oleh risiko pelaporan keuangan, dengan demikian hipotesis 4a diterima.

Pada penelitian Subramaniam, *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa pembentukan SRMC dan secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh risiko pelaporan keuangan. Pembentukan SRMC ini bisa saja disebabkan karena naiknya proporsi piutang usaha dan persediaan terhadap *total asset*. Sedangkan pada penelitian ini proporsi piutang usaha dan persediaan mempengaruhi pembentukan RMC dan SRMC, walaupun dalam perusahaan finansial non perbankan tidak mengenal adanya rekening persediaan dalam laporan keuangannya. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa ketika suatu risiko pelaporan keuangan meningkat, maka perusahaan mungkin memandang perlu untuk membentuk komite baru seperti RMC dan SRMC yang dapat digunakan untuk meminimalkan risiko tersebut.

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh *Leverage* terhadap pembentukan RMC menunjukkan koefisien negatif sebesar 2,242 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,263. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan RMC tidak dipengaruhi oleh *leverage*, dengan demikian hipotesis 5 ditolak. Pengujian hipotesis mengenai pengaruh *Leverage* terhadap pembentukan SRMC menunjukkan koefisien negatif sebesar 0,614 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,789. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan SRMC tidak dipengaruhi oleh *leverage*, dengan demikian hipotesis 5a ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Subramaniam, *et al.*, (2009). Dalam hal ini, perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi selalu berusaha untuk menghemat berbagai biaya yang kemungkinan bisa timbul akibat berbagai aktivitasnya. Bagi perusahaan dengan *leverage* tinggi, membentuk komite pengawas baru justru akan lebih memakan biaya yang lebih tinggi (Andarini, 2010). Hal inilah yang semakin menurunkan potensi perusahaan untuk membentuk RMC dan SRMC secara sukarela.

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap pembentukan RMC menunjukkan koefisien positif sebesar 0,839 dengan tingkat signifikansi 0,041. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan RMC dipengaruhi oleh kompleksitas perusahaan, dengan demikian hipotesis 6 diterima. Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap pembentukan SRMC menunjukkan koefisien negatif sebesar 0,002 dengan tingkat signifikansi 0,998. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pembentukan SRMC tidak dipengaruhi oleh kompleksitas perusahaan, dengan demikian hipotesis 6a ditolak.

Penelitian ini tidak dapat menemukan pengaruh antara kompleksitas dengan pembentukan SRMC. Hal ini bisa saja disebabkan karena penelitian ini masih menggunakan *proxy* pengukuran yang sama dengan penelitian Subramaniam, *et al.* (2009). Penelitian ini juga belum dapat menemukan *proxy* yang lebih tepat untuk mengukur variabel kompleksitas. Menurut Andarini (2010) jumlah segmen yang beragam tidak menjamin semakin kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan. Perusahaan yang hanya mempunyai satu segmen usaha, mungkin saja memiliki segmen geografis yang tersebar luas, hal inilah yang bisa saja menyebabkan makin kompleksnya berbagai risiko yang dihadapi perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh karakteristik Dewan Komisaris, yang terdiri dari proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan Komisaris dan pengaruh karakteristik perusahaan, yang terdiri dari risiko pelaporan keuangan, proporsi utang jangka panjang dan kompleksitas terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*). Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko.
2. Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit.
3. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko.
4. Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit.
5. Frekuensi rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko.
6. Frekuensi rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit.
7. Risiko Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko.
8. Risiko Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit.
9. Leverage tidak berpengaruh terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko.
10. Leverage tidak berpengaruh terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit.
11. Kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko.
12. Kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. *Pertama*, Komite Manajemen Risiko merupakan isu yang tergolong masih baru, apalagi pada perusahaan finansial non perbankan, terbukti dari perusahaan yang dijadikan sampel, perusahaan yang membentuk komite ini masih sangat minim. *Kedua*, terlalu banyak perusahaan yang dieliminasi karena data yang tidak lengkap terkait dengan variabel penelitian ataupun data tidak dapat ditemukan, hal ini dapat menyebabkan risiko bias dalam penelitian. *Ketiga*, Nilai *Nagelkerke R Square* pada penelitian ini masih tergolong rendah, yaitu 0,478 atau 47,8% (RMC) dan 0,575 atau 57,5% (SRMC) sehingga masih terdapat variabel-variabel lain di luar model dalam penelitian ini yang berpengaruh terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang terpisah dari Komite Audit.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian serupa di masa yang akan datang. *Pertama*, selain data yang berkriteria data sekunder, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kuesioner atau wawancara. Sehingga diharapkan dengan menggunakan 2 metode primer tersebut dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai Komite Manajemen Risiko dalam perusahaan. *Kedua*, menambahkan variabel lain yang mungkin lebih relevan dan memiliki pengaruh terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko.

REFERENSI

- Andarini, Putri W. 2010. "Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risk Management Committee pada Perusahaan Go Public Indonesia". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Bates, E. William II dan Robert J. Leclerc. 2009. "Boards of Directors and Risk Committees". *Corporate Governance Advisory* Vol. 17 No.6 pp. 15-17.
- Burlando. 1990., "The 1990s : The Decade of Risk Management", *Risk Management*, Vol. 37, No. 3, p. 50.
- Bursa Efek Jakarta. 2000. *Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat*. Jakarta.
- Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. 2004. "Enterprise Risk Management – Integrated Framework". <http://coso.org>, diakses tanggal 14 September 2012.
- Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. 2009. "Effective Enterprise Risk Oversight, The Role of Board of Directors". <http://coso.org>, diakses tanggal 14 September 2012
- Indrayati, Martha R. 2010. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Jensen, Michael C. And William H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure". http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94043, diakses tanggal 29 September 2012
- Jorion, Philippe. 2002. *Value at Risk*. United States. McGraw-Hill Companies, Inc.
- Juwitasari, Ratih. 2008. "Pengaruh Independensi, Frekuensi Rapat, Dan Remunerasi Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2007". *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Komite Nasional Corporate Governance. 2002. *Pedoman Pembentukan Komite Audit*. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2011. *Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance*. Jakarta.
- Korosec, B. and R. Horvat. 2005. "Risk Reporting in Corporate Annual Report". *Economic and Business Review*, Vol. 7, No. 3, pp. 217-237.



- KPMG. 2001. "Enterprise Risk Management : An Emerging Model For Building Shareholder Value". <http://www.kpmg.com.au/aci/docs/ent-risk-mgt.pdf>, diakses tanggal 16 September 2012.
- KPMG. 2005. "Strategic Risk Management Survey". <http://www.kpmg.com.au/aci/docs/trends-strategic-risk-mgt.pdf>, diakses tanggal 16 September 2012.
- Krus, Cynthia M. And H. L. Orowitz. 2009. "The Risk-Adjusted Board : How Should The Board Manage Risk?". *Corporate Governance Advisor*, Vol. 17, No.2.
- PT Bakrie and Brothers Tbk. 2008. Annual Report.
- Subramaniam, Nava, L. McManus, and Jiani Zhang. 2009. "Corporate Governance Firm Characteristics, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 4, pp. 316-339.
- Yatim, Puan. 2009. "Audit Committee Characteristic and Risk Management of Malaysian Listed Firms". *Malaysian Accounting Review*, Vol. 8, No. 1, pp. 19-36.